

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi**

##### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi menurut David Gorlin merupakan proses yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma supaya ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya<sup>1</sup>.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Zulkarimein Nasution mengemukakan “sosialisasi merupakan proses sosio-psikologis yang dijalani setiap orang dan berlangsung seumur hidup dalam menerima norma-norma atau nilai-nilai, dan pola perilaku yang dianut masyarakat menjadi bagian dari dirinya”.<sup>2</sup>

Kemudian Charles R. Wright menjelaskan “bahwa proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai ke tingkat tertentu), norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang itu untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Siti Komsiah, *Modul Sosiologi Komunikasi : Media Massa dan Proses Sosialisasi*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, 2010), h. 2.

<sup>2</sup>Ibid, h. 2.

<sup>3</sup>Ibid, h. 2.

## 2. Politik

Definisi politik menurut Inu Kencana Syafii adalah Politik dalam Bahasa Arab disebut *Siyasyah* atau dalam Bahasa Inggris *Politics*. Politik sendiri berarti cerdas dan bijaksana. Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik galibnya membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak.

Selain itu, politik juga “mempengaruhi ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakikat negara, serta bentuk dan tujuan negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti kelompok penekan, kelompok kepentingan, elit politik, pendapat umum, peranan partai, dan pemilihan umum”.<sup>4</sup>

Menurut Surbakti sejak awal hingga perkembangannya saat ini, setidaknya ada lima pandangan terkait politik:

Pertama, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik* dalam buku *mengenal Teori-Teori Politik*, (Depok: 2005), h. 7.

<sup>5</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 2.

### 3. Sosialisasi Politik

Istilah Sosialisasi Politik diungkapkan menurut Mas'ood, yaitu berasal dari:

secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu Sosialisasi dan Politik. Konsep sosialisasi oleh para ilmuwan sosial diartikan sebagai cara bagaimana anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang diharapkan akan mereka jalankan kelak bila sudah dewasa.<sup>6</sup>

Kemudian Michael Rush dan Philip Althoff menyatakan, ada beberapa segi penting dari sosialisasi:

Pertama sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman. Kedua, hasil belajar itu berupa tingkah laku individu yang mencakup batas-batas yang luas, khususnya mengenai pengetahuan atau informasi, motif-motif atau nilai-nilai dan sikap-sikap. Tingkah laku itu bukan hanya tingkah laku individu saja, melainkan pula tingkah laku kelompok, dimana individu tersebut menjadi bagian daripadanya. Ketiga, sosialisasi itu tidak terbatas pada masa anak-anak dan remaja saja, melainkan berlangsung sepanjang kehidupan. Keempat, sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivis sosial dan secara implisit atau eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.<sup>7</sup>

“Sosialisasi politik merupakan proses, dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya”.<sup>8</sup> Artinya, individu merupakan subjek dari perubahan sosial perlu dituntun dalam menjalankan proses sosialisasi politik oleh agen sosialisasi politik, salah satunya yaitu media massa.

<sup>6</sup>Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.198.

<sup>7</sup>Ibid, h.198.

<sup>8</sup>Rush-Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 118.

Penjelasan mengenai pengertian dari sosialisasi politik yang disampaikan menurut Rush dan Althoff adalah:

sosialisasi politik itu bukannya dan tidak dapat dibiarkan untuk mencari salurannya sendiri, juga tidak dapat memberikan pengetahuan yang tidak terkontrol, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang mungkin bisa menentang ideology yang bersangkutan. Maka pikiran (jiwa) manusia itu harus direbut, dituntun, dan dikekang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari negara lewat wahana dari ideologinya.<sup>9</sup>

Menurut Almond ( Mochtar Mas' oed dan Colin Mac Andrews) menjelaskan bagian dari sosialisasi politik :

bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakatnya berpartisipasi dalam sistem politiknya. Sosialisasi politik menunjuk pada proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik.<sup>10</sup>

Sedangkan David Easton dan Jack Dennis memberikan definisi yang lebih singkat, yaitu menurutnya “sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya (Rush dan Althoff)”.

Berdasarkan batasan diatas, Rush dan Althoff, menyimpulkan dan sekaligus menyederhanakan pengertian sosialisasi politik sebagaimana proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang

---

<sup>9</sup>Ibid, h. 88.

<sup>10</sup>Komarudin Sahid, *Op.cit*, h. 198.

tersebut menentukan tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.<sup>11</sup>

Dalam prosesnya sosialisasi, menurut Almond (Mas'ood dan Andrews), dijelaskan yaitu:

ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama sosialisasi berlangsung secara terus menerus selama hidup seseorang. Kedua sosialisasi bisa dalam wujud transmisi dan pengajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>12</sup> Jika sosialisasi melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai dan perasaan-perasaan politik secara eksplisit, maka sosialisasi ini bersifat langsung.<sup>13</sup> Kemudian secara tidak langsung umumnya terjadi pada anak-anak, karena informasi politik yang diberikan tidak secara eksplisit disampaikan pada anak-anak.<sup>14</sup>

Selain fungsi yang bersifat individual dan kelompok, sosialisasi politik juga bisa memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk pewarisan kebudayaan itu oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Dan sosialisasi politik juga dapat mengubah kebudayaan politik. Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa memelihara, mengubah, dan menciptakan kebudayaan politik adalah macam-macam fungsi yang dijalankan oleh sosialisasi politik.<sup>15</sup>

Dengan mengambil contoh dari salah satu teori yaitu teori Rush dan Althoff dapat memberikan suatu gambaran bahwa proses sosialisasi politik itu tidak dapat dengan begitu saja seorang individu mendapatkan sosialisasi politik dengan

---

<sup>11</sup>Ibid, h.199.

<sup>12</sup>Ibid, h.199.

<sup>13</sup>Ibid, h.199.

<sup>14</sup>Ibid, h. 200.

<sup>15</sup>Ibid, h. 200.

sendirinya, namun dalam kenyataan dilapangannya proses sosialisasi politik perlu dikendalikan oleh pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan seperti itu, contohnya negara melalui partai politik, atau media massa.

Sosialisasi politik yang dapat pula dikatakan sebagai suatu proses mempengaruhi secara politik tanpa kesengajaan, dimana itu juga menunjukkan bahwa anak dan orang dewasa itu tanpa sengaja dan tanpa refleksi harus hidup menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan ketentuan dari struktur-struktur yang ada di masyarakat.<sup>16</sup>

Dimana kegiatan sosialisasi politik ini bertujuan untuk memelihara, mengubah, dan menciptakan kebudayaan politik sebagaimana yang terdapat dalam proses sosialisasi politik tersebut maka perlu adanya seorang atau badan yang melakukan itu semua, dan nama seseorang atau badan yang melakukan aktivitas sosialisasi politik disebut agen sosialisasi politik.

#### **4. Agen Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik dijalankan melalui bermacam-macam lembaga, beberapa di antaranya, seperti pelajaran kewarganeraan di sekolah-sekolah yang sengaja dirancang demitujuan sosialisasi politik, disamping juga untuk tujuan yang lain

---

<sup>16</sup>Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 180.

pula. Hal tersebut berbeda dengan kelompok pergaulan dan pekerjaan, yang cenderung untuk mempengaruhi sosialisasi politik secara tidak langsung.<sup>17</sup>

Menurut pendapat Almond (Mochtar Mas' oed dan Mac Andrew), terdapat beberapa lembaga atau agen sosialisasi politik:

#### a. Keluarga

Pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai lembaga sosialisasi pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal. Pengaruh yang paling jelas dari keluarga ini adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan. Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan luas, dengan membentuk ikatan-ikatan etnis, linguistik, religius, dan kelas sosialnya.<sup>18</sup>

#### b. Sekolah

Orang terpelajar lebih sadar terpengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, lebih banyak memperoleh informasi tentang proses-proses politik, dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkret tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan “saluran pewarisan” nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya.<sup>19</sup>

#### c. Kelompok Pergaulan

Setiap individu dalam kelompok itu menyesuaikan pendapatnya dengan temannya mungkin karena menyukainya atau menghormatinya, atau juga karena ingin sama dengan temannya. Jadi, pergaulan itu mensosialisasikan anggotanya dengan cara mendorong atau mendesak untuk menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompok itu.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Komarudin Sahid, *Op.cit*, h. 201.

<sup>18</sup>Ibid, h. 202.

<sup>19</sup>Ibid, h. 202.

<sup>20</sup>Ibid, h. 203.

#### d. Pekerjaan

Dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu. Individu-individu mengidentifikasi dengan suatu kelompok tertentu dan menggunakan kelompok itu sebagai penyuluh dalam kehidupan politik.<sup>21</sup>

#### e. Kontak-Kontak Politik Langsung

Meskipun pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga atau sekolah begitu positif, tetapi apabila kenyataan dalam masyarakat begitu sangat berbeda dan cenderung negatif, seperti adanya diskriminasi oleh partai dan pemerintah, adanya kesenjangan ekonomi dan sebagainya, maka pandangan terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Artinya kontak-kontak langsung dengan pemerintah, lembaga politik, dan kehidupan politik sangat mempengaruhi sikap dan perilaku politik individu dan kelompok untuk tetap setia atau tidak, bersedia mendukung atau tidak terhadap sistem politik pemerintah, atau partai politik yang semula didukungnya.<sup>22</sup>

#### f. Media Massa

Masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang luas, cepat dan secara umum seragam. Di era globalisasi, informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana saja di dunia segera menjadi pengetahuan umum dalam beberapa jam saja. Sebagian masyarakat dunia, terutama bagian-bagiannya yang modern telah menjadi satu kelompok penonton tunggal, yang tergerak hatinya oleh peristiwa-peristiwa yang sama dan dirangsang oleh selera-selera yang sama. Kita tahu bahwa media massa, surat kabar, dsb. Memegang peranan penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa mereka, termasuk sikap dan nilai politik.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Ibid, h. 203.

<sup>22</sup>Ibid, h. 204.

<sup>23</sup>Ibid, h. 204.

Dalam proses sosialisasi politik yang dijalankan oleh agen sosialisasi politik intinya adalah memberikan suatu pembelajaran politik kepada masyarakat yang biasa disebut Pendidikan politik. Sekilas memang tidak terdapat perbedaan antara sosialisasi politik dan pendidikan politik. Ada beberapa ilmuwan sosial lainnya yang beranggapan bahwa kedua konsep itu sama. Namun apabila dipahami lebih mendalam lagi sebenarnya konsep pendidikan politik merupakan varian dan derivasi dari sosialisasi politik. Karena sosialisasi politik lebih luas cakupannya daripada pendidikan politik<sup>24</sup>.

## **5. Pendidikan Politik**

Pendidikan Politik merupakan suatu upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut R. Hayer menyebutkan bahwa “Pendidikan Politik merupakan suatu usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik”.<sup>26</sup>

Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik:

---

<sup>24</sup>Ibid, h. 201.

<sup>25</sup>Kartini Kartono, *Op.cit.* h. 64.

<sup>26</sup>Ibid, h. 64.

harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti berpendapat bahwa: Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Pengertian dari pendidikan politik yang lebih spesifik dapat diambil dari pendapatnya Alfian yang mengatakan bahwa:

pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun".<sup>27</sup>

Menurut pandangan Dale (dalam Arfani) yang menyatakan, bahwa "pendidikan politik adalah transformasi nilai-nilai, interpretasi simbol-simbol kekuasaan dan politik".

Dale kemudian mengemukakan tiga ciri utama ini yang pertama adalah "mempertanyakan proses pembuatan keputusan, kemudian mereduksi politik menjadi administrasi, dan terfokus pada perangkat kerja".

Kemudian selanjutnya, studi tentang pendidikan politik dapat menerangkan pola-pola, kebijakan, dan proses pendidikan dalam masyarakat secara memadai, disamping memungkinkan kita untuk mempertanyakan persoalan-persoalan diseperti asumsi, maksud dan outcome berbagai strategi perubahan pendidikan ranah politik.

---

<sup>27</sup>Hasim M, *Pendidikan Kewarganegaraan 2*, (Bogor: Quadra, 2007), h. 15.

Sedangkan Panggabean, menungkapkan dan melihat pendidikan politik sebagai:

cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian. Pendidikan politik mengupayakan penghayatan warga masyarakat terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup bermasyarakat dan bernegara serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing.<sup>28</sup>

Menyadari kedudukan akan pentingnya pendidikan politik di tengah masyarakat, maka pendidikan politik mempunyai tugas penting yang dapat menyadarkan masyarakat, yaitu:

1. akan kedudukannya sebagai warga negara dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab sosialnya.
2. agar dapat memahami kesulitan atau permasalahan sendiri.
3. agar menyadari implikasi sosial serta konsekuensi politik dari setiap perbuatannya di tengah masyarakat.
4. agar menyadari kondisi lingkungan hidupnya dan seluruh relasinya di suatu wilayah, yaitu negara.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik dapat membentuk masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai kesadaran politik yang tinggi, bermoral, beretika, dan mengarahkan suatu masyarakat pada tatanan

---

<sup>28</sup>Komarudin Sahid, *Op.cit*, h. 201.

sistem politik yang ideal, yaitu suatu kehidupan masyarakat politik yang berdasarkan Pancasila khususnya.<sup>29</sup>

Idealnya dengan masyarakat yang mempunyai kesadaran politik tersebut yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 khususnya, maka dapat dilihat dalam perilaku seperti:

1. sadar akan hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara.
2. sadar dan taat pada ketentuan hukum yang berlaku.
3. sadar untuk mendukung sistem kehidupan nasional secara demokratis.
4. aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa.
5. mampu menegakkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.<sup>30</sup>
6. berpartisipasi dalam berpolitik.

Pendidikan Politik yang dilakukan secara intensional (dengan sengaja dan dengan tujuan tertentu). Merupakan suatu kegiatan edukatif yang intensional dan sistematis untuk mengarahkan anak muda dan orang dewasa pada proses belajar berpartisipasi aktif di tengah kehidupan politik.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Hasim M, *Op.cit*, h. 15.

<sup>30</sup>Ibid, h. 15-16.

<sup>31</sup>Kartini Kartono, *Op.cit*, h.180.

## 6. Media Massa atau *Pers*

Dalam arti sempit pers berasal dari kata (to) *press* yang artinya mencetak, merujuk kepada surat kabar (dan majalah). semua media massa merupakan perpanjangan komunikasi manusia secara konvensional (ideal) berfungsi menerangkan, mendidik, menghibur, dan membujuk. tetapi kenyataannya, fungsi pers kini telah mengalami pergeseran (ditambah lagi menyesatkan, membodohi, meninabobokan, memanjakkan, dsb.), meskipun fungsi-fungsi lama hingga derajat tertentu masih berlaku.<sup>32</sup>

## 7. Sejarah Pers

Kegiatan Jurnalistik awalnya terjadi sekitar 3000 tahun lalu, ketika Raja Firaun di Mesir, Amenhotep III, mengirim ratusan pesan kepada para perwiranya di berbagai provinsi, yang berisi informasi tentang hal-hal yang terjadi di ibukota kerajaan itu (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006). Namun, media pertama yang berbentuk cetakan disebut *Acta Diurna* (catatan harian) di Roma dan *Gazzetta* di Venezia yang masih berbentuk newsheet, yaitu kertas-kertas lepas yang digantungkan. Isi *Acta Diurna* berupa informasi dari pusat pemerintahan Romawi kepada rakyatnya sekitar tahun 59 sebelum masehi. Informasi itu dipasang di *Forum Romanum* (Stadion Romawi) agar diketahui rakyat. Sedangkan berbagai undang-undang, peraturan, dan tata tertib yang disahkan senat negeri tersebut diumumkan di depan gedung senat Romawi dan disebut *Acta Senatus*. Informasi keagamaan diumumkan Imam Agung di papan halaman gereja dengan

---

<sup>32</sup>Deddy Mulyana, *Komunikasi Massa :Kontroversi, Teori, dan Aplikasi*, (Bandung:Widya Padjajaran, 2008), h. 17.

nama *Anales*, sedangkan orang yang menyebarkan hal itu disebut *Diurnarius* (Soenaryo & Soenaryo).<sup>33</sup>

Para petinggi dan majikan di Roma pada masa itu biasa menugaskan para budak (*Slave*) yang cerdas dan bisa membaca dan menulis guna mencatat berbagai informasi yang diumumkan pemerintah Roma. Lama-kelamaan, mereka memanfaatkan informasi sebagai usaha dengan mencari informasi berkeliling daerah, sehingga muncul istilah *Slave Reporter* atau “Kuli Tinta”. Kata Jurnalistik sendiri berasal dari bahasa Inggris *Journal* atau bahasa Perancis *Du Jour* yang berarti hari, sehingga informasi yang termuat dalam lembaran tercetak merupakan berita yang terjadi sehari-hari (Supriyanto, 1986).<sup>34</sup>

Bersamaan dengan kemajuan teknologi, ketika Johannes Guttenberg menemukan proses cetak tahun 1440, perkembangan surat kabar semakin pesat. Guttenberg yang merupakan biarawan menggunakan mesin itu untuk memperbanyak injil, yang sebelumnya ditulis dengan tangan. Mesin cetak tersebut berbentuk silinder (rotasi) sehingga untuk mencetak kertas ditekan (dijepit) diantara silinder, akibatnya muncullah istilah *press* (tekan). Kemudian, banyak orang yang menyamakan jurnalistik dengan pers (Assegaf, 1983).<sup>35</sup>

Eropa Barat sebagai tanah kelahiran institusi sosial “mesin pers”, menurut Santana (2005), dianggap sebagai wilayah awal pertumbuhan jurnalisme. Belgia merupakan Negara tempat surat kabar pertama diterbitkan. Surat kabar itu dicetak

---

<sup>33</sup>Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 28.

<sup>34</sup>Ibid, h. 28.

<sup>35</sup>Ibid, h. 29.

*Vramma Vergevena* di Anwerp tahun 1605 dan diberi nama *NieweTydingen*, yang berarti kumpulan berita (*all news*). Sedangkan surat kabar pertama yang terbit secara teratur menurut Kusumaningrat & Kusumaningrat (2006) dimulai di Jerman, yang bernama *Aviso* di Wolfenbuttel dan *Relation* di Strasbourg. Setelah itu, berdasarkan catatan ensiklopedi, muncul berbagai terbitan regular di Negara-negara lain di Eropa.<sup>36</sup>

Embrio media jurnalistik cetak berdasarkan sejarah, menurut Santana (2005), juga terjadi di Asia, seperti di China dan Jepang. Dimana berisikan laporan berbagai informasi seputar pejabat pemerintah.<sup>37</sup>

Namun untuk di Indonesia sendiri sejarah pers secara umum, menurut Supriyanto (1986), dapat diklasifikasikan menjadi dua periode, meliputi masa penjajahan dan masa setelah kemerdekaan hingga kini. Dengan dasar itu, dapat dikatakan bahwa surat kabar pertama yang terbit di Indonesia muncul pada zaman penjajahan Belanda, yang pada masa itu dipimpin oleh Jenderal van Jonhoff. Nama medianya adalah *Baviasche Nouvelles* (1774), terbit di Batavia, yang diterbitkan orang kulit putih dan isinya mendukung sistem pemerintahan colonial, namun tidak tercatat kapan media tersebut berhenti terbit.<sup>38</sup>

Pada tahun 1886, Meulen Hoff mendirikan *Pemberitaan Betawi* di Batavia. Setahun kemudian, Stevanus Sandiman dan Mas Marcus Garito mendirikan *Bianglala*, yang cukup lama usianya. *Sinar Terang* (1888-1891) diterbitkan Yap

---

<sup>36</sup>Ibid, h. 29.

<sup>37</sup>Ibid, h. 29.

<sup>38</sup>Ibid, h. 30.

Goan Ho di Batavia. *Pertja Barat* (1890-1912) diterbitkan Liem Bian Goan dan *Tjaja Soematra* (1899-1933) diterbitkan Liem soen Hian, yang keduanya berada di Padang.<sup>39</sup>

Selain Koran dengan nama Indonesia itu, juga muncul Koran-koran dengan nama Cina, seperti *Keng Po* di Batavia, *Lin Po* di Sukabumi (1901-1925), dan *Sin Bin* di Bandung. Pejuang Indonesia, seperti R. M. SoewardiSoerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) mendirikan *Indonische Persbureau* (1913) di Den Hag, Belanda. L. N. Palar di Belanda juga mendirikan *Persbureau Indonesia* (1928). R. M. Tirto Adhisoerja mendirikan *Bintang Betawi* (1894-1906) di Batavia dan kemudian berubah nama menjadi *Medan Prijaji* pada tahun 1906-1912, dan masih banyak lagi media lainnya.<sup>40</sup>

Kemudian beralih kepada masa penjajahan pemerintahan Jepang dimana pemerintahan Jepang melarang pers berbahasa Belanda dan Cina. Koran berbahasa Indonesia pun mendapat sensor ketat dari Jepang dan jumlahnya hanya beberapa saja yang tersisa, antara lain *Asia Raja* (Jakarta), *Sinar Baroe* (Semarang), *Sinar Matahari* (Jogjakarta), *Soeara Asia* (Soerabaja), *Kita Sumatera Shinbun* (Tapanuli), *Shinbun* (Tarutung), *Atjeh Shinbun* (Kutaraja). Kantor berita Antara diganti namanya menjadi *Domei* (berbahasa Indonesia) dan *Yashima* (berbahasa Jepang).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Ibid, h. 30.

<sup>40</sup>Ibid, h. 31.

<sup>41</sup>Ibid, h. 31.

Pada awal masa kemerdekaan Indonesia sendiri, beberapa surat kabar terbit di berbagai daerah antara lain seperti *Koran Merdeka*, *Pedoman*, dan *Berita Indonesia* di Jakarta, *Waspada* di Medan, *Mimbar Oemoem* di Tebing Tinggi, *Adil* di Solo, *Kedaulatan Rakjat* dan *Kantor Berita Antara* di Jogjakarta. Sedangkan secara nasional, pada saat itu diperkirakan terdapat sekitar 75 surat kabar dan majalah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, Belanda, dan Cina.<sup>42</sup>

Kemudian berlanjut pada era dimana pers nasional berada pada masa pers liberal sesuai dengan kondisi pemerintahan yang menggunakan sistem liberal saat itu. Waktu itu, beberapa surat kabar muncul seperti *Soerabaja Post* dan *Jawa Pos* di Surabaya, *kedaulatan Rakjat* dan *Minggoean Pagi* di Jogjakarta, serta *Pemandangan* di Jakarta, dan banyak lagi di daerah lainnya di Indonesia. Dengan bahasa yang digunakan pun beragam yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, atau Cina.<sup>43</sup>

Perkembangan partai politik pun pada masa itu ikut mempengaruhi media massa dengan munculnya surat kabar yang dibina oleh partai politik saat itu, seperti, *Soeloeh Indonesia* (PNI), *Harian Rakjat* (PKI), *Doeta Masjarakat* (NU), *Abadi* (Masyumi), dan *Pedoman* (PSI). setahun sebelum Dekrit Presiden Soekarno keluar, terjadinya masa kelabu media massa Indonesia ditinjau dari sisi kemerdekaan pers, dengan dibredelnya 40 surat kabar karena isinya dinyatakan bertentangan dengan kebijakan presiden saat itu, sehingga tidak diperbolehkan terbit. Beberapa surat kabar tersebut antara lain *Keng Po*, *Indonesia Raja*, dan

---

<sup>42</sup>Ibid, h. 31.

<sup>43</sup>Ibid, h. 32.

*Bintang Minggoe* dari Jakarta, *Masyarakat Baroe* (Samarinda), dan *Penerangan* (Padang).<sup>44</sup>

Selanjutnya sesudah Dekrit Presiden, Indonesia memasuki sistem demokrasi terpimpin, termasuk surat kabar dan majalah yang di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 187 buah. Pada masa itu cirinya, informasi media massa tidak boleh bertentangan dengan presiden. Justru yang beroplah besar adalah media yang dikelola partai politik, seperti *Soeloeh Indonesia* (PNI), *Harian Rakjat* (PKI), *Warta Bhakti* (Baperki), *Doeta Masjarakat* (NU), dan *Pedoman* (PSI). surat kabar umum yang terbit di masa itu, antara lain *Merdeka* (1961), *Sinar Harapan* (1961), dan *Kompas* (1965).<sup>45</sup>

Dengan berakhirnya Pemberontakan G30S/PKI menyebabkan pula beberapa surat kabar yang berhaluan kiri dilarang seperti *Harian Rakjat*, *Warta Bhakti*, dan *Soeloeh Indonesia*. Bersamaan dengan muncul pers dan surat kabar mahasiswa sebagai media perjuangannya, seperti *Harian KAMI* dan *Minggoean Mahasiswa Indonesia* di Bandung.<sup>46</sup>

Namun demikian, perjalan pers nasional kembali mengalami peristiwa kelabu, setelah terjadi peristiwa 15 januari 1974, yang dikenal dengan sebutan Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), beberapa surat kabar dilarang terbit, seperti *Indonesia Raja*, *Pedoman*, *Abadi*, *KAMI*, *El-Bahar*, *Minggoean Mahasiswa Indonesia*, dan *Mingguan Srikandi*. Setelah peristiwa itu, surat kabar

---

<sup>44</sup>Ibid, h. 32.

<sup>45</sup>Ibid, h. 32.

<sup>46</sup>Ibid, h. 32.

yang berkembang justru surat kabar independen dan professional. Terbukti, sesudah tahun 1970-an, tercatat 1.559 surat izin terbit (SIT) yang dikeluarkan pemerintah untuk persuratkabaran.<sup>47</sup>

Guna membedakan pers umum milik lembaga independen dan pers khusus, seperti milik perguruan tinggi atau lembaga lain, pemerintah menetapkan surat kabar umum harus memiliki surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP), sedangkan pers khusus tetap menggunakan SIT. Pada masa lalu, dikembangkan pula moto pers bebas yang bertanggung jawab perannya sehingga sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga yang mencerahkan masyarakat.<sup>48</sup>

## 8. Ciri-ciri Media Massa

Menurut penjelasan dari Onong Uchjana effendy, terdapat ciri dari surat kabar, yaitu Publisitas, Periodesitas, Universalitas, dan Aktualitas:

*Publisitas*, ialah penyebaran kepada publik atau khalayak. Karena diperuntukkan untuk khalayak, maka sifat surat kabar harian tersebut adalah umum. Isi surat kabarnya terdiri dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan kepentingan umum dan juga dengan sendirinya pula akan memenuhi kepentingan kepentingan khalayak yang lebih banyak.

*Periodesitas*, ialah keteraturan terbitnya surat kabar bisa satu kali sehari, bisa dua kali sehari, dapat pula satu kali atau dua kali seminggu. Penerbitan lainnya seperti buku umpamanya, tidak disebarkan secara periodik, tidak teratur, karena terbitnya hanya satu kali.

*Universalitas*, ialah kesemestaan isinya, aneka ragam, dan dari seluruh dunia. Sebuah penerbitan berkala yang isinya

---

<sup>47</sup>Ibid, h. 33.

<sup>48</sup>Ibid, h. 33.

mengkhususkan diri pada suatu profesi atau aspek kehidupan, seperti majalah kedokteran, arsitektur, koperasi atau pertanian, tidak termasuk surat kabar. Adalah benar bahwa berkala tersebut diperuntukkan khalayak dan terbit secara periodik, tetapi ciri universalitas tidak ada, sebab isinya hanya mengenai suatu aspek kehidupan saja. Universalitas juga berlaku bagi setiap kalangan masyarakat.

*Aktualitas*, laporan mengenai peristiwa yang baru terjadi dan kini, dan dilaporkan harus dengan benar, dengan memperhatikan kecepatan laporan, tanpa menyampingkan pentingnya kebenaran berita.<sup>49</sup>

Sebagai bagian dari media massa, media cetak juga harus memiliki cirri-ciri yaitu Pesan yang disampaikan memuat reproduksi utama ex:symbol verbal, gambar, dan warna, bersifat *portable*, relatif nyaman dan mudah kemana-mana, bisa dibaca dimana saja, dan membacanya dapat dilakukan berulang-ulang, unsur umpan balik yang ada juga bersifat verbal (surat pembaca, kritik) dan non verbal (penjualan).<sup>50</sup>

Selain itu, ciri berikutnya yakni Sumber kehidupan industry media cetak adalah iklan dan penjualan (eceran maupun langganan), isi pesan yang ada utamanya informatif, bisa berfungsi sebagai *public sphere*, menjadi ruang public bagi penyampaian gagasan dari masyarakat (biasanya ada ruang gagasan dan opini, yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk tulisan), selain yang memuat perdebatan atau isu yang menjadi polemik, relatif bebas dari regulasi (control melalui peraturan), terutama di dalam masyarakat yang menganut sistem

---

<sup>49</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 90-91.

<sup>50</sup> Nurani Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Ar-ruz, 2010), h. 200.

pers bebas, wilayah jangkauannya masih didominasi oleh masyarakat perkotaan (urban).<sup>51</sup>

Ciri-ciri dari pengertian diatas, media massa harian juga memang harus berfungsi sebagai suatu sarana penyambung suara masyarakat dan wahana industri. Kemudian informasi yang disampaikanpun sebagai media sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Kemudian terkontrol oleh peraturan yang mengikat, dan jangkauan khalayak masih di dominasi oleh masyarakat di daerah perkotaan meskipun relatif terdistribusikan dengan merata, tidak hanya di kota. Selain dari karakteristik yang harus dipenuhi oleh media massa harian, untuk menyerap isi surat kabar, pembaca dituntut untuk bisa membaca serta memiliki kemampuan intelektualitas tertentu.

## **9. Fungsi dan Peran Media Massa**

Di Indonesia fungsi media massa saat ini sudah diatur dalam konstitusi, yaitu pada Undang-undang No.40 Tahun 1999 yaitu Media informasi, Media pendidikan, Media hiburan dan Kontrol sosial.<sup>52</sup>

Dari beberapa fungsi menurut yang tertera diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat fungsi utama dari media massa yang termasuk didalamnya adalah media massa harian seperti surat kabar, yaitu fungsi informasi, edukasi, hiburan, dan persuasif. Fungsi yang paling menonjol pada media massa harian adalah

---

<sup>51</sup>Ibid, h. 200.

<sup>52</sup>Pasal 3 Undang – undang No. 40 Tahun 1999.

informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama khalayak membaca media massa harian, yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Karenanya sebagian besar rubrik media massa harian terdiri dari berbagai jenis berita.<sup>53</sup>

Media Massa sendiri merupakan sebuah institusi yang juga berperan sebagai *agent of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan:

- a. sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi. Menjadi media yang mendidik masyarakatnya supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju.
- b. menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang terbuka dan jujur dan benar disampaikan pers kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya akan informasi, masyarakat yang terbuka dengan informasi, sebaliknya pula masyarakat akan menjadi masyarakat informatif, masyarakat yang dapat menyampaikan informasi dengan jujur kepada pers atau media massa. Selain itu, informasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai masyarakat dunia yang dapat berpartisipasi dengan berbagai kemampuannya.
- c. terakhir media massa atau pers adalah sebagai media hiburan. Sebagai *agent of change*, pers juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan, katalisator perkembangan budaya. Sebagai *agent of change* yang dimaksud adalah juga mendorong agar perkembangan budaya itu bermanfaat bagi manusia bermoral dan masyarakat sakinah, dengan demikian pers juga berperan untuk mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru merusak perdaban manusia dan masyarakatnya.

---

<sup>53</sup>Elvinaro Ardianto,dkk , *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, Edisi Revisi*, (Bandung: Simbiosis, 2007), h. 111.

Menurut Subiakto secara lebih spesifik peran pers saat ini lebih menyentuh persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat secara aktual, seperti:

- a. harus lebih spesifik dan proporsional dalam melihat sebuah persoalan sehingga mampu menjadi media edukasi dan media informasi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.
- b. dalam memotret realitas, pers harus fokus pada realitas masyarakat, bukan pada potret kekuasaan yang ada di masyarakat itu, sehingga informasi tidak menjadi propaganda kekuasaan, potret figur kekuasaan.
- c. sebagai lembaga edukasi, pers harus dapat memilah kepentingan pencerahan dengan kepentingan pers sebagai lembaga produksi, sehingga kasus-kasus pengburan berita dan iklan tidak harus terjadi dan merugikan masyarakat.
- d. pers juga harus menjadi *early warning system*, hal ini terkait dengan peran sebagai media informasi, dimana lingkungan saat ini mejjadi sumber ancaman. Pers menjadi sebuah system dalam system besar peringatan terhadap ancaman lingkungan, bukan hanya menginformasikan informasisetelah terjadi bahaya dari llingkungan itu.
- e. dalam hal menghadapi ancaman masyarakat yang lebih besar seperti terorisme, seharusnya pers lebih banyak menyoroti aspek fundamental pada terorisme seperti mengapa terorisme itu terjadi bukan hanya pada aksi-aksi terorisme.<sup>54</sup>

Media Massa atau Pers secara teoretis memiliki fungsi dan perannya dalam saluran informasi, saluran pendidikan dan saluran hiburan, namun kenyataannya pers memberi efektif lain diluar fungsinya itu. efek pers tidak saja mempengaruhi sikap seseorang namun pula dapat mempengaruhi perilaku,bahkan pada tataran yang lebih jauh efek media massa dapat mempengaruhi sistem-sistem sosial maupun sistem budaya masyarakat.

---

<sup>54</sup>Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 85-87.

Berbicara mengenai peran ataupun fungsi pers, mau tidak mau harus berbicara dalam tatanan pers yang terstrukturkan. Peran memang sering dipandang sebagai bagian dari struktur yang terbentuk dalam suatu proses sebelumnya dan akan terus berproses, lazimnya secara evolusioner. Oleh karena itu dalam mengkaji bagaimana seharusnya peranpers dalam masa transisi (reformasi) Indonesia saat ini perlu juga membicarakan peran pers sebelumnya, yakni pada masa orde baru, karena peran pers kita tidak muncul dari suatu vakum sosial.<sup>55</sup>

Meminjam definisi Lewis Coser, suatu perjuangan atas nilai dan tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumberdaya yang langka. Pers berperan penting dalam pembentukan, mobilisasi, dan pemeliharaan konflik antarkelompok.<sup>56</sup>

Peliputan atas isu, peristiwa atau pelaku konflik mencerminkan distribusi kekuasaan dalam sistem sosial, dan khususnya kepentingan kelompok dominan (pemerintah dan kroninya) dalam sistem sosial tersebut. Dalam konteks ini, secara selektif pers berfungsi mempercepat, memperlambat, menjelaskan atau meredefinisikan konflik sosial. kelompok penguasa dapat menggunakan pers untuk memperoleh perhatian, simpati dan kesetiaan dari masyarakat dan menciptakan serta memperkuat kredibilitasnya sendiri, dan menjatuhkan kredibilitas pihaklawan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Deddy Mulyana, *Komunikasi Massa :Kontroversi, Teori, dan Aplikasi*, (Bandung:Widya Padjajaran, 2008), h. 100.

<sup>56</sup>Ibid, h. 102.

<sup>57</sup>Ibid, h. 102.

Pers kita saat ini belum mengalami kemajuan yang berarti, atau malah disebut kemunduran, dibandingkan dengan peran mereka sebelumnya. Masa transisi yang kita alami sekarang membuat sebagian besar pers menderita semacam krisis identitas atau gegar budaya. Mereka tercerabut dari fondasi yang lama, akan tetapi kini belum memiliki fondasi baru yang kokoh tempat mereka berpijak. Tidak mengherankan jika mereka mendefinisikan era reformasi sebagai era kebebasan tanpa batas, sehingga banyak pers, terutama media baru yang muncul pada transisi ini. Kalau dulu pers cenderung bak kambing yang dicocok hidungnya oleh pemerintah, kini pers tampaknya justru berperilaku liar. Pokoknya mereka asal berbeda dengan pemerintah, kalau perlu beroposisi (seperti yang diklaim oleh *Rakyat Merdeka*), tanpa menyadari bahwa kita semuanya saling membutuhkan, perlu saling mengingatkan, dan saling membantu untuk mencapai Indonesia yang kita cita-citakan, Indonesia yang beradab, makmur, dan mensejahterakan rakyat lahir-batin.

Perubahan peran suatu institusi seperti pers memang tidak mudah dilakukan, karena perubahan tersebut menyangkut juga perubahan pola pikir dan mentalitas para individu yang terlibat dalam institusi tersebut. Dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk membentuk jati-diri pers kita terlebih dahulu dan melazimkan perilaku mereka, maka dibutuhkan waktu puluhan tahun pula untuk membentuk jati diri yang baru dan melazimkan perilaku yang baru pula, yang lebih konstruktif untuk membangun bangsa kita.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Ibid, h. 100-102.

Maka dari itu untuk menciptakan suatu pers yang ideal, kita perlu mengacu kepada beberapa mengenai teori pers, berikut beberapa teori mengenai pers.

## 10. Empat Teori Pers

Dalam *Four Theories of the Press* (Siebert, Peterson, dan Schramm, Severin dan Tankard, Jr.), membagi pers di dunia dalam empat kategori: Otoriter, Liberal, Tanggung Jawab Sosial, dan Komunis Soviet. Namun kesemuanya merupakan “Teori Normative” yang berasal dari pengamatan, bukan dari hasil ujian pembuatan hipotesis dengan menggunakan metode ilmu sosial.<sup>59</sup>

### a. Teori Otoriter

Penemuan alat cetak pers dan pelat huruf yang mudah dipindah terjadi saat dunia dibawah kekuasaan otoriter sistem kerajaan dengan kekuasaan absolutnya. Ketika dasar dan teori pers pertama (teori otoriter) mendukung dan menjadi kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Dalam sistem otoriter, pers bisa dimiliki baik secara publik atau perorangan, namun demikian, tetap dianggap sebagai alat untuk menyebar kebijakan pemerintah (Severin dan Tankard, Jr.).<sup>60</sup>

### b. Teori Liberal

Teori Liberal pers berkembang sebagai dampak dari massa pencerahan dan teori umum tentang rasionalisasi serta hak-hak alamiah dan berusaha melawan pandangan yang otoriter. Dari tulisan Milton, Locke, dan Mill dapat dimunculkan pemahaman bahwa pers harus mendukung fungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah sekaligus sebagai media

---

<sup>59</sup>Burhan Bungin, *Op.cit*, h. 289

<sup>60</sup>Ibid, h. 289

yang memberikan informasi, menghibur, dan mencari keuntungan. (Severin dan Tankard, Jr.).<sup>61</sup>

#### c. Teori Tanggung Jawab Sosial

Di abad kedua puluh di Amerika Serikat, ada gagasan yang berkembang, bahwa media satu-satunya industri yang dilindungi Piagam Hak Asasi Manusia, harus memenuhi tanggung jawab sosial. Selain bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, mencari untung (seperti teori liberal), juga bertujuan untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi. Teori ini mengatakan bahwa, setiap orang yang memiliki sesuatu yang penting untuk dikemukakan harus diberikan hak dalam forum, dan jika media dianggap tidak memenuhi kewajibannya, maka ada pihak yang harus memaksanya. Dibawah teori ini, media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen, kode etik profesional, dan dalam hal penyiaran, dikontrol oleh badan pengatur mengingat keterbatasan teknis pada jumlah saluran frekuensi yang tersedia (Effendy).<sup>62</sup>

#### d. Teori Komunis Soviet

Teori otoriter pers di banyak negara berubah menjadi teori Totaliter-Soviet. Soviet berpandangan, bahwa tujuan utama media adalah membantu keberhasilan dan kelangsungan sistem Soviet. Media dikontrol oleh tindakan ekonomi dan politik dari pemerintah dan badan pengawas dan hanya anggota partai yang loyal dan anggota partai ortodoks saja yang bisa menggunakan media secara reguler. Media dalam sistem soviet dimiliki dan dikontrol oleh negara dan ada hanya sebagai kepanjangan tangan negara.<sup>63</sup>

Schramm berpendapat pengawasan terhadap media massa harus berpijak pada mereka yang memiliki fasilitas, sarana percetakan, stasiun siaran, dan lain-lain. Selama kelas kapitalis mengawasi fasilitas fisik ini, kelas buruh harus

---

<sup>61</sup>Ibid, h. 290.

<sup>62</sup>Ibid, h. 290.

<sup>63</sup>Ibid, h. 291.

mempunyai sarana komunikasi sendiri dan kebasan pers hanya ada pada masyarakat tanpa kelas (Effendy).<sup>64</sup>

## 11. Efek Media Massa

Efek dari pers sendiri dapat pula mempengaruhi seseorang dalam waktu pendek sehingga dengan cepat mempengaruhi mereka, namun juga memberikan efek dalam waktu lama juga, sehingga dapat memberikan dampak pada perubahan – perubahan dalam waktu yang lama. Hal tersebut dikarenakan efek dari pers sendiri terjadi secara disengaja, namun ada juga efek yang diterima masyarakat tanpa disengaja.

Ibarat sebuah bola yang menggelinding di lapangan pertandingan, efek media sangatlah tergantung dari siapa yang menendang bola itu, dalam kondisi apa bola itu ditendang serta bagaimana kondisi lawan, sehingga kadang menghasilkan skor yang dapat direncanakan namun kadang skor itu tercipta tanpa direncanakan sama sekali.

Denis McQuail menjelaskan efek media massa memiliki typology yang mana terdiri dari empat bagian yang besar, yaitu:

Pertama, efek media merupakan efek yang direncanakan, sebagai sebuah efek yang diharapkan terjadi baik oleh pers sendiri ataupun orang yang menggunakan media massa untuk kepentingan berbagai penyebaran informasi. Kedua, efek media massa yang tidak direncanakan atau tidak dapat diperkirakan, sebagai efek yang benar-benar di luar kontrol media, di luar kemampuan media ataupun orang lain yang menggunakan media untuk penyebaran informasi melalui media untuk mengontrol terjadinya efek media

---

<sup>64</sup>Ibid, h. 292.

massa. Jadi, efek kedua ini, efek media terjadi dalam kondisi tidak dapat diperkirakan dan efek media terjadi dalam kondisi tidak dapat dikontrol. Ketiga, efek media massa terjadi dalam waktu pendek namun secara cepat, instan, dan keras mempengaruhi seseorang atau masyarakat. Keempat, efek media massa berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga mempengaruhi sikap-sikap adopsi, inovasi, kontrol sosial sampai dengan perubahan kelembagaan, dan persoalan-persoalan perubahan budaya.<sup>65</sup>

Efek media massa yang dapat direncanakanpun bisa terjadi dalam waktu yang pendek atau juga dalam waktu yang cepat, tetapi juga dapat direncanakan dalam waktu yang lama. Efek dari media massa yang dapat direncanakan dan terjadi dalam waktu yang cepat yaitu seperti propaganda, respons individu, kampanye media, *news learning*, peminimalisasi berita, dan termasuk juga *agenda-setting*. Sebuah pemberitaan media massa melalui propaganda contohnya, maka media massa dapat melakukannya dalam waktu singkat, yaitu beberapa menit di media massa, kemudian efek media massanya dapat pula diperkirakan sampai seberapa jauh menjangkau masyarakat, termasuk luasan efek yang dapat terjadi. Begitu pula kampanye media seperti iklan, dapat juga dilakukan dalam waktu singkat, dan efek iklan dapat diperkirakan sejauh mana mempengaruhi masyarakat. Peminimalisasi berita (*framing*), dengan maksud-maksud tertentu oleh sebuah media massa, dapat dilakukan dalam waktu pendek dan efeknya dapat membentuk opini-opini yang bisa diperkirakan oleh orang media, termasuk pula *agenda-setting* berakibat terhadap terpolanya agenda masyarakat sesuai dengan pilihan agenda media.

---

<sup>65</sup>Burhan Bungin, *Op.cit.* h. 317-318.

Namun, efek media yang terencana ini juga dapat dilakukan dalam waktu yang lama, dengan efek media yang lama pula terjadi di masyarakat. Dengan pemberitaan yang direncanakan oleh media, maka media dapat merencanakan terjadinya sebuah difusi menjadi berbagai pemberitaan di sekitar itu, bahkan akan terjadi media dapat menyebar gagasan-gagasan difusi inovasi terhadap hal-hal yang baru di masyarakat. Sebuah difusi inovasi yang baik di masyarakat akan dengan mudah mendapat penerimaan masyarakat, karena itu dalam waktu yang lama, media dapat menyebarkan difusi inovasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Contoh dari dua tipologi efek media ini (tipologi terencana dalam waktu pendek dan dalam waktu lama) adalah sederet pemberitaan media tentang penggunaan formalin dalam makanan. Berita ini bisa menjadi propaganda, bisa jadi kampanye media, bahkan bisa pula menjadi *agenda-setting*, namun dilakukan dalam waktu pendek, efeknya di masyarakat adalah bahwa masyarakat menjadi sangat terpukul karena selama ini mereka tak menyadari makanan-makanan telah teracuni formalin dan berbagai zat beracun lainnya, karena ada masyarakat yang takut mengkonsumsi beberapa jenis makanan, akibatnya beberapa produsen makanan yang diduga tercemar itu bangkrut, pemerintah dan para tokoh masyarakat ikut berwacana untuk membuat peraturan yang mengatur formalin dan zat-zat beracun lainnya.

Dahsyatnya pemberitaan formalin menyebabkan masyarakat merasa sedang dihinggapi teror racun, ngeri dan menyeramkan. Namun perasaan mengerikan dan menyeramkan itu lambat laun akan berkurang seiring dengan berkurangnya pemberitaan tentang formalin itu di media massa. Sedangkan siaran media massa,

khususnya televisi tentang lagu-lagu dangdut ngebor dalam waktu yang lama, walaupun pada awalnya ditentang oleh banyak pihak di masyarakat, namun lama-kelamaan, acara-acara itu kemudian juga dapat diterima oleh masyarakat itu. Bahkan media sadar bahwa acara ngebor itu akan melahirkan acara lain disekitarnya seperti acara wawancara dengan figur-figur ngebor, penayangan kisah hidup mereka, acara baru lainnya yang meniru acara ngebor, dan sebagainya.<sup>66</sup>

Kemudian untuk efek media massa yang terjadi tak terencana dapat berlangsung dalam dua tipologi, yaitu terjadi dalam waktu cepat dan terjadi dalam waktu yang lama. Yang terjadi dalam waktu cepat merupakan tindakan reaksional terhadap pemberitaan yang tiba-tiba menggaetkan masyarakat. Pemberitaan macam ini tanpa disadari media akan menimbulkan reaksi individu yang merasa dirugikan, akan reaksi kelompok yang merasa dicemarkan, bahkan bisa memicu tindakan-tindakan kekerasan. Seperti reaksi terhadap pemberitaan *Majalah Tempo* oleh seorang pengusaha di Jakarta sehingga sampai ke pengadilan.

Begitu pula, pemberitaan media massa tentang kekerasan dan kriminal, seperti, Derap Hukum, Tikam, Patroli dan sebagainya. Sekilas dalam waktu pendek tak bermasalah, orang yang menonton acara itu tidak langsung melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilihatnya di televisi atau media massa lain. Namun dalam waktu yang lama, tanpa disadarinya, acara-acara macam itu akan menciptakan “jalan keluar” yang tak dikehendaki oleh dirinya sendiri,

---

<sup>66</sup>Ibid. h. 319-320.

apabila ia mengalami masalah yang sama dengan apa yang dilihatnya di televisi. Jadi, efek media massa ini telah menciptakan “peta analog” mengenai jalan keluar dari masalah yang akan dihadapi di waktu yang akan datang. Sehingga apabila orang itu terkena musibah, maka dengan gampang saja ia menggunakan racun nyamuk untuk menghabiskan hidupnya, karena “peta analog” penyelesaian masalah seperti itu telah lama hidup dalam “*theater of the mind*”-nya.<sup>67</sup>

Selain apa yang dijelaskan oleh McQuail diatas tentang efek media massa dan tingkat kerusakan sosial yang terjadi akibat dari efek media, secara empirik, efek media massa yang tidak diharapkan (cenderung merusak) memiliki andil dalam hal pembentukan sikap, perilaku, dan keadaan masyarakat seperti sebagai berikut ini.

- Penyebaran budaya global yang menyebabkan masyarakat berubah dari tradisional ke modern, dari modern ke post-modern, dan dari taat beragama ke sekuler.
- Media massa kapitalis telah memicu hilangnya berbagai bentuk kesenian dan budaya tradisioanal di masyarakat yang mestinya dipelihara.
- Terjadinya perilaku imitasi yang kadang menjurus kepada meniru hal-hal yang buruk dari apa yang ia lihat dan ia dengar dari media massa.
- Efek media massa sering secara brutal menyerang seseorang dan merusak nama baik orang tersebut serta menjurus ke pembunuhan karakter seseorang.
- Persaingan media massa yang tidak sehat menyebabkan media massa mengorbankan idealismenya dengan menyajikan berbagai pemberitaan yang justru menyerang norma-norma sosial

---

<sup>67</sup>Ibid. h. 320-321.

sehingga menyebabkan terciptanya perilaku pelanggaran norma sosial.<sup>68</sup>

- Penyebaran pemberitaan pornomedia menyebabkan luntarnya lembaga perkawinan dan norma seks keluarga di masyarakat, bahkan memicu terbentuknya perilaku penyimpangan seksual di masyarakat.
- Berita kekerasan dan teror di media massa telah memicu terbentuknya “ketakutan massa” di masyarakatnya. Masyarakat selalu merasa tidak aman, tidak menyenangkan bahkan tidak nyaman menjadi anggota masyarakat tertentu.
- Media massa kapitalis telah sukses mengubah masyarakat, dari kota sampai desa, menjadi masyarakat yang konsumerisme dan masyarakat pemimpi, masyarakat yang hidup dalam dunia seribu satu malam tanpa harus bekerja keras. Hal ini menjadi sangat kontradiksi karena di satu sisi masyarakat menjadi konsumerisme dan di sisi lain menjadi pemimpi dan pemalas.
- Media massa cenderung menjadi alat provokasi sebuah kekuasaan sehingga efek media massa menindas rakyat, bahkan dalam skala luas, media massa menjadi alat kolonialisme modern, dengan memihak kepada suatu negara adidaya, dan menjadi gendang perang untuk memerangi negara-negara kecil dan miskin.<sup>69</sup>

Kini, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang disampaikan oleh media massa sendiri kepada khalayak ramai membuat meningkatnya kecerdasan masyarakat berarti meningkatnya pula sikap kritis dari masyarakat. Sikap itu menggejala antara lain dengan makin tumbuhnya keinginan masyarakat untuk mengetahui berbagai data dan informasi, mengenai segala sesuatu yang mereka lihat dan dengar melalui media yang ada.

---

<sup>68</sup>Ibid, h.322.

<sup>69</sup>Ibid. h. 323.

Sikap tersebut menunjukkan tingkat kemajuan masyarakat / khalayak yang semakin menggembirakan, dan sikap tersebut perlu dipupuk, dipelihara dan dikembangkan. Kita berusaha untuk membenatu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap data dan informasi.

Dengan demikian media massa dituntut pula untuk meningkatkan sikap yang sehat kepada masyarakat, fair, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan demikian media massa harus bertanggung jawab terhadap pemberitaannya kepada masyarakat. Sikap yang tidak sehat dan bertanggung jawab akan melemahkan sikap kritis masyarakat dan merugikan pers sendiri.

Apakah sikap ini tidak disadari, akibatnya akan menjadikan sikap apatis masyarakat, tidak peduli karena ada kecenderungan media massa menolak setiap kritikan dan saran dari masyarakat. Karena media massa yang berdasarkan Pancasila selalu memperhatikan aspirasi masyarakat.

Media massa dalam negara yang berdasarkan Pancasila, ia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ia bebas tetapi tidak sewenang-wenang.<sup>70</sup>

Dalam hubungan dengan Hari Ulang Tahun PWI Ke-40 dan Hari Pers Nasional ke-2 (II,1986) pada tanggal 9 february 1986 dari pendengaran, penglihatan , dan pembacaan, timbul pertanyaan apa, siapa, bagaimana dan mengapa Pers Pancasila itu. Walaupun penulis beranggapan bahwa Pers Pancasila adalah Pers Nasional yang dilandasi Pancasila, Pers Pancasila adalah Pers yang sehat dan bertanggung jawab.

---

<sup>70</sup>H.A.W. Widjaja, *Komunikasi: Komunikasi & Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 131.

Sejalan dengan itu ingin dapat dikaitkan dengan pendengaran, penglihatan, dan pembacaan melalui media beberapa pendapat tokoh-tokoh yang berkenaan dengan upacara hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia ke-40 dan hari Pers Nasional ke-II tanggal 9 februari 1986.

1. Pers Nasional sebagai Sarana Perjuangan yang Ampuh dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan.
2. Melembaganya Mekanisme Positif antara Pers Pemerintah dan Masyarakat.
3. Pers telah memiliki Identitas dan Semakin Membaik.
4. Pers Indonesia Sekarang Sudah lebih Dewasa.
5. Pers Indonesia Harus Mampu sebagai Motivator.
6. Keikutsertaan Pers dalam Pengawasan Pembangunan.
7. Sejarah Pers Indonesia Ditandai Idealisme Perjuangan.
8. Pers Harus Mampu Ciptakan Semangat Pembaharuan.
9. Pers dan Nilai Idealisme.
10. Profesi Kewartawanan.
11. Pers dan Kemampuan Manajemen.
12. Postur Pers dan Wartawannya.
13. Pers dan Siaran Pedesaan.
14. Abad Pertengahan.<sup>71</sup>

Di negara manapun di dunia ini bila diberikan suatu kebebasan dengan sebeb-bebasnya maka akan merusak kebebasan itu sendiri. Di negara paling liberal sekalipun, pers niscaya tidak akan memiliki kebebasan mutlak setidaknya

---

<sup>71</sup>Ibid, h. 134-154.

tidaknya ada tanggung jawab moral yang akan membetasinya, sehingga mencegah kemungkinan pemberitaan yang sewenang-wenang. Di negara komunis dengan sistem pemerintah yang otoriter, diktator atau fasitis cenderung pers menjadikan suara (juru bicara) yang berkuasa. Pers tidak memiliki kepribadian dan kemandirian ia hanya menjadi alat mereka yang berkuasa.<sup>72</sup>

Dalam negara kita yang berdasar Pancasila maka pers tidak akan menganut kebebasan sebagaimana paham liberal dan sistem komunis yang tanpa kebebasan sama sekali.<sup>73</sup>

Pers yang berdasarkan Pancasila harus menghindarkan diri dari unsur-unsur liberalisme dan komunisme, pers harus bersikap terbuka, jujur, dan bertanggung jawab sehingga menjadikan dirinya pers yang sehat, pers Pancasila harus membuka dirinya terhadap khalayak, berani berdialog dengan masyarakat dan selalu berani dan memperhatikan terhadap usul, saran, kritik dan pendapat dari masyarakat atau khalayak.<sup>74</sup>

Pers yang demikian akan menciptakan iklim yang sehat dalam masyarakat, suatu iklim dimana komunikasi dua arah berjalan dengan baik. Pers telah menyatu dengan rakyat, sebaliknya sikap yang masa bodoh terhadap aspirasi masyarakat akan mengundang kecurigaan, dan apabila hal ini terjadi tidak dapat tidak akan menimbulkan berbagai macam intrik-intrik isyu-isyu yang ada kalanya akan menyebabkan mata prasangka dari masyarakat.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup>Ibid, h. 132.

<sup>73</sup>Ibid, h. 132.

<sup>74</sup>Ibid, h. 132

<sup>75</sup>Ibid, h. 132

Oleh karena berkecamuknya isu-isu tersebut dalam masyarakat akan dapat mengganggu hubungan timbal-balik antara pihak pers dan masyarakat sendiri, sehingga akan merugikan kedua belah pihak.<sup>76</sup>

Maka tepatlah apabila pers Pancasila dituntut untuk hidup dan tumbuh secara bebas tetap sehat dan bertanggung jawab. Tanpa itu akan tidak terkendali, pada hakikatnya pers itu adalah komunikator, maka tingkatkan kemampuan dan pengetahuannya harus berada di depan atau diatas rata-rata komunikannya. Pers harus mampu menterjemahkan bukan saja rencana pemerintah kepada rakyat, juga mampu menterjemahkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, bahkan harus mampu menterjemahkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kepada masyarakat luas, harus mampu menerangkan dan bahkan menganalisa secara populer dan akurat perkembangan kemajuan di segala bidang untuk masyarakat pembaca. Tentu masih banyak tanggung jawab pers terhadap masyarakat dan terhadap keberadaan dirinya sendiri. Dengan demikian adalah jelas, dari masa ke masa tuntutan terhadap pers tidak pernah berkurang. Sebaliknya dia terus berkembang dan bertambah maju.<sup>77</sup>

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan kualitas hidup dan lingkungan. Di negara berkembang seperti di Indonesia, melaksanakan tugas pers yang sehat, bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena disamping persyaratan pers yang bertanggung jawab, masih diperlukan pula sebagai tambahan yaitu situasi dan kondisi yang tidak selamanya membantu. Disadari sepenuhnya bahwa

---

<sup>76</sup>Ibid, h. 132.

<sup>77</sup>Ibid, h. 132.

pemerintah dengan segenap aparturnya senantiasa berupaya menciptakan iklim yang sehat untuk kehidupan pers. Dalam menjalin hubungan kerja sama yang baik antara pers dan masyarakat secara timbal balik, maka sewajarnya masalah ini kita bersama merenung ulang kembali agar tetap tercipta hubungan harmonis keduanya yaitu antara pers dan masyarakat (khalayak).<sup>78</sup>

Di satu pihak bukan pers saja yang dituntut sehat dan bertanggung jawab tetapi juga sebaliknya masyarakat / khalayak dituntut pula terhadap kehidupan, ketenangan kerja dan kebebasan pers dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya dan tulisan-tulisan di pelbagai media massa yang ada.<sup>79</sup>

Kini pers kita melakukan “pertobatan”. Mereka tidak serta mengiyakan begitu saja apa yang dikatakan pemerintah contohnya, bila hal hal itu tidak sesuai dengan situasi sebenarnya dan bertentangan dengan hati nurani. Bahkan pers berani memberikan julukan-julukan balik terhadap pemerintah atau elite penguasa atau kebijakan mereka yang masih saja menggunakan pendekatan kekuasaan dan politik ala Orde Baru. Televisi dan media cetak tidak segan-segan memuat pernyataan kelompok atau individu yang menentang kebijakan elite penguasa. *Kompas* melaporkan, seorang pakar Hukum Tata Negara menjuluki RUU Keselamatan Negara yang dicoba dipaksakan TNI sebagai “Terorisme Negara” (28 Agustus 1999). Belakangan, meskipun kebablasan, *Rakyat Merdeka* memberi judul utamanya “Gonta-Ganti Menteri, Awat Kena “AIDS” (12 Juni 2001). Dalam beberapa tahun terakhir, pers tidak segan-segan mengkritik pemerintah,

---

<sup>78</sup>Ibid, h. 133.

<sup>79</sup>Ibid, h. 133.

termasuk presiden, dan wakil-wakil rakyat (DPR). Berita berjudul “DPR Sarang Koruptor” adalah hal yang biasa dalam beberapa tahun terakhir (misalnyawww.detiknews.com, 7 Juli 2008).<sup>80</sup>

Sesungguhnya pers punya tugas besar dan mulia, yakni untuk mengembangkan wacana yang sehat demi kepentingan rakyat. Melalui penyajiannya, pers seyogianya lebih berempati terhadap pihak-pihak yang dirugikan dan menderita. Pada gilirannya wacana yang sehat dapat dikembangkan untuk mencari solusi atas persoalan yang ada. Sayangnya, pers menampilkan banyak kecenderungan negatif seperti dibahas di muka.<sup>81</sup>

Sadar atau tidak, dalam meliput konflik, pers kita selama bertahun-tahun cenderung berpihak kepada kelompok tertentu, memanaskan situasi yang ada, seraya menonjolkan unsur kekarasan dari konflik tersebut dalam pemberitaan. Sekali lagi, mestinya pers memiliki misi yang mulia, yakni turut memberikan solusi atas konflik yang terjadi, bukan justru melaporkan segi-segi yang menarik dan dramatik semata-mata dengan tujuan untuk meningkatkan pasar. Para pengelola pers perlu memiliki watak “ke-Indonesiaan” yang murni dan konstruktif untuk turut membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat dan berkeadilan. Dan jangan terjebak pada fakta-fakte keras, kasar, dan telanjang, dengan berlindung di balik “netralitas” dan “objektivitas”. Pers harusnya hendak tetap mawas diri,

---

<sup>80</sup>Deddy Mulyana, *Op.cit*, h. 103.

<sup>81</sup>Ibid, h. 104.

menggunakan kebebasan yang diperolehnya berdasarkan hati nurani dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>82</sup>

Dalam konteks ke-Indonesiaan sendiri, setidaknya pers juga harus mempunyai peranan kedalam kehidupan masyarakat yang multibudaya dimana pers lokal dari masing-masing daerah dapat memberikan pendidikan dan membangun jati diri masyarakatnya dari masing-masing daerah tersebut oleh pers lokal yang ada.

Pers lokal sendiri merupakan pers yang dibangun oleh dan untuk masyarakat lokal. Lokal disini mempunyai artian satu kota, kabupaten, atau provinsi, atau wilayah yang dihuni atau suatu kelompok suku, dalam suatu wilayah geografis yang lebih besar. Fungsi dari pers lokal itu sendiri pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, apakah itu kebutuhan dari segi pendidikan, segi informasi, atau hiburan dan yang terpenting tetap sama yaitu untuk membangun mengembangkan jati diri (identitas) masyarakat lokal tersebut.

Untuk orang-orang pengelola pers, mengubah pandangan kita terhadap budaya, dari pandangan objektif (budaya adalah suatu entitas yang cenderung statis) ke pandangan interpretatif, pers kita memiliki peran optimal dalam kehidupan masyarakat yang multibudaya dewasa ini dan terutama pada masa mendatang.

Salah satu misi terpenting yang diemban pers lokal adalah misi pendidikan dalam arti seluas-luasnya.<sup>83</sup> Salah satu misi pendidikan ini adalah bagaimana

---

<sup>82</sup>Ibid, h. 103-106.

mengembangkan jati-diri masyarakatnya, karena memang pastinya sebagai salah satu agen sosialisasi pers haruslah memberikan suatu pendidikan khususnya pendidikan politik karena pers juga merupakan salah satu agen dari sosialisasi politik agar terciptanya suatu masyarakat yang mempunyai budaya politik yang partisipan.

Untuk menciptakan tujuan tersebut pastinya memang dipengaruhi oleh komunikasi politik, setiap individu akan mendapatkan stimulus dan kemudian akan merespon stimulus tersebut dengan apa yang ia yakini dalam bentuk perilaku politiknya.

Komunikasi politik sendiri ialah “proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah”.<sup>84</sup> Artinya adalah, komunikasi politik adalah sebuah proses komunikasi timbal balik oleh pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya.

Menurut Rush dan Althoff, komunikasi politik merupakan “transisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik, dan proses sosialisasi, partisipasi, dan perekrutan tergantung pada komunikasi”.<sup>85</sup>

Dari teori diatas sebenarnya dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu komunikasi politik sebagaimana bagian dari proses sosialisasi politik itu

---

<sup>83</sup>Ibid, h. 107-112.

<sup>84</sup>Surbakti, *Op.cit*, h. 152.

<sup>85</sup>Rush-Althof, *Op.cit*. h. 253.

merupakan suatu sarana yang memudahkan untuk menyampaikan suatu pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui sistem politik yang ada dengan melalui media massa karena media massa menyajikan sumber utama informasi yang relevan dengan politik bagi anak-anak, terutama anak-anak pada usia sekolah dasar. Orientasi afektif maupun kognitif dihasilkan oleh penyingkapan diri terhadap media massa.

Media massa mempunyai lebih sedikit pengaruh kepada pengembangan perilaku politik yang jelas ketimbang kepada informasi dan penilaian orang tentang politik. Ada hubungan diantara perhatian umum seseorang terhadap politik dan cara ia mengikutinya dalam media massa. Namun, hubungan antara terpaan media dan pengambilan bagian dalam kampanye politik atau pembuatan keputusan memilih tampaknya relative lemah. Dalam hal ini, hubungan antara penggunaan media cetak dan kegiatan politik lebih besar dibandingkan antara penggunaan media elektronik dan pengambilan bagian dalam politik.<sup>86</sup>

## **12. Teori Agenda *Setting* Media Massa**

Teori Penentuan Agenda atau biasa dikenal dengan *Agenda Setting Theory* adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan

---

<sup>86</sup>Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 119-120.

mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan agenda adalah:

1. Masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan, mereka menyaring dan membentuk isu.
2. Konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu yang lain.

Salah satu aspek yang paling penting dalam konsep penentuan agenda adalah peran fenomena komunikasi massa, berbagai media massa memiliki penentuan agenda yang potensial berbeda termasuk intervensi dari pemodal.<sup>87</sup>

Penentuan Agenda sendiri merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa media tidak mengatakan apa-apa yang orang pikirkan tetapi apa yang harus dipikirkan, maka dari itu dengan adanya penelitian awal agenda setting di Chapel Hill yang dilakukan oleh McCombs dan D. Shaw, maka perspektif penentuan agenda media tidak hanya sebatas wacana yang berputar-putar di tengah lingkup aktivitas media selama ini, tapi yang paling penting mendapatkan pengakuan karena dapat dibuktikan secara empiris.

Dalam memilih dan menampilkan berita, editor, staf, dan penyiar memainkan peran penting dalam membentuk realitas politik. Pembaca belajar tidak hanya mengenai isu tertentu, tetapi seberapa

---

<sup>87</sup>Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 22.

penting untuk terikat pada isu tersebut berdasarkan jumlah informasi yang ada di berita... media massa barangkali menentukan isu mana yang penting-media mengatur agenda dari berita.<sup>88</sup>

Kemudian banyak keterbatasan, penelitian dari McCombs dan D. Shaw telah menginspirasi penelitian lain menyediakan hasil yang menimbulkan kontroversi. Penelitian Shanto Iyengar dan Donald Kinder mencoba mengatasi beberapa masalah dalam penelitian terdahulu dengan serangkaian eksperimen yang diterbitkan tahun 1987. Untuk membangun teori semacam itu, mereka menawarkan sebuah ujian bagi “Hipotesis Agenda Setting; yaitu masalah-masalah yang mendapatkan perhatian besar dari berita nasional menjadi masalah yang dipandang publik sebagai penting juga”.<sup>89</sup>

Jadi sebenarnya menurut Baran dan Davis “untuk dapat melihat agenda setting sebagai suatu teori dapat diaplikasikan dan muncul ke permukaan ketika sebuah isu-isu krusial penting menjadi diskusi nasional di tengah-tengah masyarakat”.<sup>90</sup> Iyengar dan Kinder melaporkan serangkaian eksperimen tambahan yang memberikan bukti lebih lanjut soal penentuan agenda. Eksperimen menemukan bahwa persepsi pemirsa mengenai apakah penting atau tidak pentingnya suatu isu dipengaruhi oleh tayangan satu berita televisi. Yang dikenal dengan teknik *Priming*. Menurut Severin dan Tankard, Jr. *Priming* yaitu “Proses dimana media berfokus pada sebagian isu dan tidak pada isu lainnya dan dengan demikian

---

<sup>88</sup>Ibid, h. 32.

<sup>89</sup>Ibid, h. 37.

<sup>90</sup>Ibid, h. 37.

mengubah standar yang digunakan orang untuk mengevaluasi para calon pemilihan”.<sup>91</sup>

*Priming* dalam agenda setting dilihat dalam perpektif situasional dan kontekstual. Situasional maksudnya, teori agenda setting dapat berlaku dalam situasi-situasi tertentu yang membutuhkan perhatian publik secara besar, sedangkan secara kontekstual berlaku pada isu-isu atau konteks masalah tertentu saja. Untuk itu Iyengar dan Kinder menemukan metode *Priming* (penonjolan isu tertentu). Rangkaian eksperimen mereka membahas seputar agenda setting, kekuatan pemberitaan, penempatan berita, dan *priming*. *Priming* merupakan bagian penting dari agenda setting yang memuat pernyataan bahwa media menarik perhatian kepada aspek politik tertentu dari aspek lainnya.<sup>92</sup>

Jadi, *Priming* adalah proses bagaimana media menganggap suatu isu itu penting dan menonjol-nonjolkan sepanjang waktu agar menjadi wacana publik dan yang paling penting adalah hal apa yang diutamakan dalam isu tertentu karena hal ini penting dilakukan agar agenda setting tersebut dapat terbentuk. Isu mana yang perlu dikesampingkan dalam pemberitaan dan mana yang harus ditonjolkan.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup>Ibid, h. 39.

<sup>92</sup>Ibid, h. 41.

<sup>93</sup>Ibid, h. 42.

Harold Gene Zucker melakukan penelitian dengan membandingkan sejumlah isu-isu yang dianggap menonjol. Adapun untuk mengetahui opini publik berkaitan penting atau tidaknya, Zucker menyatakan:

Menojolnya isu mungkin menjadi faktor yang penting dalam apakah terjadi penentuan agenda atau tidak. Semakin kurang pengalaman langsung yang dimiliki publik berkenaan dengan topik isu tertentu semakin besar publik harus bergantung kepada berita mengenai isu tersebut.<sup>94</sup>

Terdapat perbedaan dengan penelitian awal agenda setting oleh McCombs dan Shaw yang mendapatkan hubungan korelasional pada syrat kabar, sedangkan Iyengar dan Kinder pada televisi. Bagaimanapun itu menunjukkan adanya pengaruh media dalam penentuan agenda.<sup>95</sup>

Proses agenda setting bekerja pada khalayak dengan arus komunikasi dua langkah, yaitu dari media sendiri dan / atau orang yang diterpa oleh isu berita kepada orang lain. Jadi, proses agenda setting tidak berlangsung satu arah saja dari media langsung kepada khalayak, namun untuk menuju kepada khalayak tertentu, suatu isu dapat melalui khalayak lain terlebih dahulu sampai kepada khalayak yang dituju. Isu itu akan berputar-putar terlebih dahulu sebelum sampai kepada khalayak yang tepat.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>Ibid, h. 43.

<sup>95</sup>Ibid, h. 39.

<sup>96</sup>Ibid, h. 44.

Kemudian dalam agenda setting terdapat tahapan selanjutnya yaitu tahapan kedua yang biasa disebut *Framing*, McCombs sebagai pionir agenda setting melalui penelitian ilmiahnya telah melakukan langkah awal dalam mengembangkan dan memperluas teori ini dengan menghubungkannya dengan teori *framing*. McCombs menyebut teori barunya itu sebagai agenda setting tahap dua. McCombs berpendapat bahwa:

Agenda setting bekerja pada dua level yakni level objek dan level atribut. Penelitian agenda setting biasanya berfokus pada level objek dan telah mengukur bagaimana pemberitaan media dapat mempengaruhi prioritas yang diberikan pada objek (misalnya, isu, kandidat, peristiwa, dan masalah). Dengan melakukan hal ini, media sudah melakukan kepada kita apa yang seharusnya dipikirkan, akan tetapi juga media dapat memberitahu kepada kita untuk bagaimana memikirkan objek tertentu. Media melakukan hal ini dengan mempengaruhi lapisan kedua “agenda atribut”. Media memberitahukan pada kita karakteristik objek mana yang penting dan mana yang tidak.<sup>97</sup>

Model agenda setting yang dijelaskan sebelumnya adalah model penentuan agenda yang berlangsung secara umum di permukaan, namun secara spesifik untuk melihat bagaimana proses agenda setting berjalan lebih detail McCombs (Chapel Hill) menyebutnya model penentuan agenda tahap kedua (*the second level-of-agenda setting model*).

McCombs dan Estrada menggambarkan tingkat kedua agenda setting sebagai berikut:

Apabila kita menganggap kata kunci metafora teoretis ini – agenda- dalam istilah yang benar-benar abstrak, kemungkinan untuk meluas

---

<sup>97</sup>Ibid, h. 55.

melampaui agenda isu-isu menjadi jelas. Dalam mayoritas penelitian sampai saat ini, unit analisis pada setiap agenda adalah sebuah objek, sebuah isu publik. Diluar agenda objek-objek, juga ada dimensi lain untuk dipertimbangkan. Masing-masing objek ini mempunyai banyak sekali atribut-karakteristik dan sifat-sifat yang mengisi dan menghidupkan gambar dari masing-masing objek. Seperti halnya objek yang bervariasi dalam keutamaannya, demikian pula atribut setiap objek.<sup>98</sup>

Menurut Baran, *framing* merupakan pernyataan bahwa orang menggunakan seperangkat pengharapan untuk memaknai dunia sosialnya dan media turut berkontribusi membantu proses pengharapan tersebut. Kerangka dalam teori *framing*, merupakan alat yang digunakan mencapai pengharapan tertentu yang digunakan untuk memaknai beberapa aspek dunia sosial dalam situasi dan waktu tertentu, ia pun mengatakan:

Bahwa agenda setting tahap kedua merupakan, pernyataan bahwa media mengatur agenda publik pada lapisan kedua-level atribut (bagaimana memikirkan sesuatu), sementara lapisan pertamanya adalah level objek (apa yang seharusnya dipikirkan).<sup>99</sup>

Untuk lapisan kedua agenda setting dan framing berbagi pemahaman untuk agenda atribut (kerangka), proses agenda setting (proses *framing*), dan pengaruh agenda setting (efek *framing*). Penyatuan antara agenda setting dan *framing* akan membantu menjelaskan bagaimana *framing* itu bekerja. Dengan

---

<sup>98</sup>Ibid, h. 57.

<sup>99</sup>Ibid, h. 57.

menjelaskan struktur teoretisnya akan membantu upaya memahami kerangka dan karakteristik dalam proses komunikasi.<sup>100</sup>

Salah seorang sosiolog Erving Goffman yang membangun kerangka analisis memberikan pemahaman cukup sistematis bagaimana kita membangun pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Goffman tertarik mengamati kesalahan yang sering kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang sering menyalahartikan kesopanan dengan rayuan bagaimana penipu bisa mengelabui orang. Hal itu karena orang secara terus-menerus bahkan secara radikal mengubah atau mendefinisikan dalam melambangkan situasi, tindakan orang seiring berjalannya waktu. Hal ini terjadi karena kita masing-masing menerapkan skema perlambangan tertentu. Setiap orang dapat berpindah dari satu realitas ke realitas lain. Kemampuan manusia untuk menilai dan memikirkan sesuatu memiliki keterbatasan, sehingga kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh memaknai sesuatu bahkan oleh karenanya, karena keterbatasan tersebut realitas kita diatur oleh suatu institusi sosial, dalam konteks komunikasi massa yaitu media massa.<sup>101</sup>

Stephen W. Littlejohn mengatakan, agenda setting beroperasi dalam tiga bagian sebagai berikut.

1. Agenda media itu sendiri harus diformat. Proses ini akan memunculkan masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada waktu pertama kali.

---

<sup>100</sup>ibid, h. 57.

<sup>101</sup>ibid, h. 58.

2. Agenda media dalam banyak hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan media mampu mempengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya.
3. Agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adakah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu.<sup>102</sup>

Kemudian agenda setting beroperasi dalam tiga bagian, yaitu Agenda Media, Agenda Khalayak, dan Agenda Kebijakan.

1. Agenda Media: agenda harus diformat, proses akan memunculkan masalah bagaimana agenda media ini terjadi pada waktu pertama kali dengan dimensi yang berkaitan, antara lain: *Visibility* (yakni jumlah dan tingkat menonjolnya berita), *Audience Salience* (tingkat menonjol bagi khalayak), *Valence* (valensi), yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa.
2. Agenda Khalayak: agenda media dalam banyak hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau

---

<sup>102</sup>Ibid, h. 68.

kepentingan isu tertentu bagi publik. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan media mampu mempengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya. Dimensi yang berkaitan antara lain: *Familiarity* (keakraban), *Personal Salience* (penonjolan pribadi), *Favorability* (kesenangan).

3. Agenda Kebijakan: agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu. Dimensi yang berkaitan antara lain: *Support* (dukungan), *Likelihood of Action* (kemungkinan kegiatan), yakni kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diharapkan, *Freedom of Action* (kebebasan bertindak), yakni nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah.<sup>103</sup>

McCombs dan Estrada menyebut konseptualisasi penentuan agenda dengan memasukkan penentuan agenda tahap kedua dengan menyebut sebagai berikut:

Merumuskan kembali pernyataan klasik Cohen, media mungkin tidak hanya memberi tahu kita apa yang harus dipertimbangkan, media juga memberi tahu kita bagaimana dan apa yang dipertimbangkan, dan bahkan apa yang harus dilakukan tentang hal itu.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>ibid, h. 68.

<sup>104</sup>ibid, h. 69.